

Nama : Fasihul Ilmi
NRP : 3122600027
Kelas : 1 D4 IT A

1. Contoh kasus relasi agama dengan nation state

Contoh kasus terkait tema relasi agama dengan nation state dapat dilihat dari beberapa negara yang memiliki agama sebagai dasar negaranya. Berikut adalah beberapa contoh:

Saudi Arabia: Negara ini dikenal sebagai negara dengan agama Islam sebagai agama resmi dan dasar negaranya. Pemerintah Saudi Arabia mempunyai wewenang untuk mengontrol seluruh masjid dan aktivitas keagamaan yang terjadi di dalamnya. Selain itu, hukum Islam juga menjadi dasar hukum negara, dan pemerintah Saudi Arabia menetapkan banyak aturan yang didasarkan pada ajaran Islam, seperti melarang perempuan untuk mengemudi, mewajibkan laki-laki untuk menunaikan ibadah haji, dan lain-lain.

Israel: Negara ini dianggap sebagai negara Yahudi, dan agama Yahudi menjadi dasar negara Israel. Hal ini tercermin dari simbol-simbol negara seperti bendera yang memiliki bintang David dan lambang menorah, serta lagu kebangsaan yang berjudul "Hatikvah" yang bermakna "harapan" dalam bahasa Ibrani. Meskipun demikian, Israel juga dihuni oleh penduduk non-Yahudi seperti Muslim dan Kristen, yang seringkali merasa tidak diakui dan diabaikan oleh pemerintah Israel.

Iran: Negara ini dikenal sebagai negara Islam yang berdasarkan Syi'ah. Pemerintah Iran mempunyai wewenang besar dalam mengatur kegiatan keagamaan dan bahkan mendirikan Dewan Wali Faqih yang dipimpin oleh seorang pemimpin tertinggi (rahbar) yang dianggap sebagai pengganti Nabi Muhammad. Hukum Islam menjadi dasar hukum negara dan diterapkan secara ketat di Iran, seperti dilarangnya minuman beralkohol dan adanya aturan berpakaian yang ketat bagi perempuan.

2. Refleksi kritis dan Analisa kontekstualisasi relasi agama dengan nation state

Refleksi kritis secara kontekstual terhadap tema relasi agama dengan nation state dapat dilakukan dengan melihat berbagai permasalahan dan tantangan yang muncul dalam hubungan antara agama dan negara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan refleksi kritis tersebut adalah:

Toleransi dan kebebasan beragama: Apakah negara tersebut mengakui dan menghormati hak kebebasan beragama bagi seluruh warga negaranya, termasuk minoritas agama? Apakah negara tersebut mempromosikan toleransi dan kerukunan antarumat beragama?

Diskriminasi: Apakah ada tindakan diskriminasi yang dilakukan terhadap warga negara yang berbeda agama atau keyakinan? Apakah negara tersebut melakukan diskriminasi sistemik atau struktural yang merugikan salah satu agama atau kelompok agama tertentu?

Pengaruh agama terhadap kebijakan publik: Apakah agama digunakan sebagai alat untuk

membenarkan kebijakan publik yang tidak adil atau diskriminatif? Apakah kebijakan publik yang didasarkan pada agama tersebut memenuhi prinsip keadilan dan kemanusiaan?

Hak asasi manusia: Apakah negara tersebut mengakui hak asasi manusia yang universal dan merespons perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara tanpa membedakan agama atau keyakinan mereka? Apakah negara tersebut memberikan perlindungan dan keamanan bagi semua warga negaranya, termasuk minoritas agama?

Peran agama dalam politik: Apakah agama dijadikan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan politik? Apakah negara tersebut memisahkan antara urusan keagamaan dan urusan politik sehingga menjaga kemandirian antara agama dan negara?

Dalam melakukan refleksi kritis terhadap tema relasi agama dengan nation state, perlu diingat bahwa setiap negara memiliki konteks dan situasi yang berbeda, sehingga analisis harus dilakukan dengan hati-hati dan objektif. Selain itu, perlu juga memperhatikan pengaruh globalisasi, media sosial, dan dinamika masyarakat yang berubah-ubah terhadap hubungan agama dan negara.

Sumber bacaan: "Religion and the State: A Comparative Analysis of Five Western Democracies" oleh James F. Sweeney dan George R. Wilburn. "Religion and State: The Muslim Approach to Politics" oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im. Dan "Religion and National Identity in the Japanese Context: A Sociological Approach" oleh Manabu Watanabe